

EVALUASI PROGRAM SUBSIDI PANTI DALAM MENDUKUNG KELANGSUNGAN PELAYANAN PANTI SOSIAL¹

*Drs. Nurdin Widodo*²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pemanfaatan subsidi oleh panti-panti sosial; (2) pengaruh subsidi panti terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pengembangan usaha ekonomi produktif; dan (3) upaya panti-panti sosial dalam mengatasi masalah pembiayaan kegiatan selanjutnya (apabila subsidi dihentikan).

Penelitian ini mengambil sampel lokasi panti di Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Data dan informasi digali melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, pada umumnya subsidi makanan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas makan pokok dan makanan tambahan dan memberikan pengaruh positif pada peningkatan kualitas menu makanan dan jenis makanan tambahan. Adapun subsidi Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dimanfaatkan untuk membuka UEP baru atau pengembangan UEP yang sudah ada, yang hasilnya menunjukkan perubahan positif meskipun baru sebagian kecil panti sosial mengalami peningkatan omset dan aset setelah mendapatkan subsidi. Terkait dengan masalah tersebut adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan UEP.

Panti-panti sosial pada umumnya masih tetap mengharapkan agar subsidi masih diterima pada masa-masa mendatang. Hal ini menggambarkan, bahwa tingkat ketergantungan panti-panti sosial terhadap pemerintah masih sangat tinggi. Dalam upaya mengatasi masalah pembiayaan, sebagian kecil dari panti sudah memiliki upaya konkret dan sebagian lainnya masih berupa gagasan. Namun, upaya ini menurut pengelola panti tetap belum bisa membantu biaya operasional panti.

Kata kunci:

Subsidi Panti, pemanfaatan subsidi, Pengaruh subsidi, Upaya panti, Harapan panti, Implikasi kebijakan

¹ Diangkat dari hasil Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Subsidi Panti Dalam Mendukung Kelangsungan Pelayanan Sosial oleh Drs. Nurdin Widodo (Ketua), Drs. Suradi, M.Si, Drs. B. Mujiyadi, MSW, Dra Nunung Unayah, Ivo Noviana, S.Sos dan Muslim Sabarisman, AKS. Penerbit Puslitbang Kesos Depsos RI, 2006

² Nurdin Widodo, Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI

Pendahuluan

Setiap makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan dan sifatnya menuntut pemenuhan dengan sesegera mungkin. Sebab apabila tidak segera dipenuhi akan menimbulkan masalah baik yang bersifat individual (*private trouble*) maupun gangguan yang bersifat kolektif (*public issues*). Menurut Neil Gilbert dan Harry Spect (dalam Sukoco, 1991), bahwa setiap manusia dimanapun dan kapanpun secara universal memiliki sejumlah kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, emosional, intelektual, spiritual dan sosial.

Selo Soemardjan (1997), membagi kebutuhan manusia menjadi tiga jenis, yaitu (1) kebutuhan dasar (*basic needs*); (2) kebutuhan sosial-psikologis (*social-psychological needs*); dan (3) kebutuhan pengembangan (*developmental needs*).

Krisis ekonomi yang hingga saat ini masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat termasuk didalamnya lembaga-lembaga pelayanan sosial mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasar ini masih merupakan hambatan. Dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah apabila kebutuhan dasar saja tidak dapat terpenuhi. Disinyalir terdapat lembaga pelayanan sosial yang merasa terancam kelangsungannya dan bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka akan menghentikan kegiatannya

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kemauan politik, pemerintah telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap permasalahan ini. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah diluncurkannya program *Bantuan Biaya Makanan dan Bantuan Usaha Ekonomis Produktif* bagi panti-panti sosial di seluruh Indonesia oleh Departemen Sosial.

Sejak diluncurkan, program ini terus mengalami peningkatan dari segi jumlah subsidi maupun jumlah panti dan klien penerima subsidi. Pada tahun 2005, panti sosial yang menerima program subsidi sebanyak 4.308 unit, dengan rincian sebanyak 149.050 orang klien menerima bantuan biaya makanan, 855 panti menerima bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dan 93 panti menerima pengembangan UEP.

Di dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2005 tentang Standardisasi Panti Sosial, ditegaskan bahwa salah satu jenis pelayanan yang diberikan oleh panti sosial adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Khusus untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan makan klien, diharapkan pihak panti sosial melakukan konsultasi dengan ahli gizi dari instansi kesehatan setempat

guna memperoleh daftar menu makan yang memenuhi standar gizi dan kesehatan. Melalui konsultasi ini maka pelayanan makan bagi klien, terutama untuk anak-anak, tidak hanya bermanfaat secara fisik, akan tetapi juga bermanfaat dalam pengembangan *intelegnensi* dan *psikomotorik*. Kemudian bagi para lanjut usia, pelayanan makan diharapkan akan mencegah atau mengendalikan gangguan fisik dan menjaga kebugaran.

Konsep pelayanan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Alfred J. Khan (Soetarso, 1980), pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh lembaga kesejahteraan sosial disebut dengan "*pelayanan kesejahteraan sosial*". Di negara-negara berkembang tertentu, pelayanan kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai pelayanan yang difokuskan pada bantuan untuk perorangan atau keluarga yang mengalami masalah penyesuaian diri dan pelaksanaan fungsi sosial atau ketelantaran. Di negara lainnya digunakan istilah "*pelayanan sosial*" untuk mencakup apa yang terkandung dalam pengertian pelayanan kesejahteraan sosial di atas ditambah dengan : (1) Bantuan sosial, yaitu yang ditekankan pada pemberian bantuan uang dan atau barang; (2) Program-program kesehatan yang tidak tercakup oleh program yang dikembangkan oleh swasta; (3) Pendidikan, Perumahan rakyat; (4) Program-program ketenagakerjaan; dan (5) Fasilitas umum.

Menurut Anthony H. Pascal (dalam M.R. Siahaan, 2004) tujuan pelayanan sosial adalah: (1) memberikan perlindungan kepada orang yang mengalami kehilangan kemampuan; (2) menyediakan pilihan-pilihan kepada penerima pelayanan; (3) mengembangkan keberfungsian sosial; dan (4) meningkatkan keadilan untuk memperoleh kesempatan.

Dalam rangka memperoleh informasi tentang bagaimana realisasi subsidi panti tersebut di lapangan dan pengaruhnya terhadap kelangsungan panti sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial perlu melaksanakan "Penelitian Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Subsidi Panti dalam mendukung Kelangsungan Pelayanan Panti Sosial". Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini, adalah :

1. Diketahuinya pemanfaatan subsidi panti oleh panti-panti sosial.
2. Diketahuinya pengaruh subsidi panti terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pengembangan usaha ekonomis produktif (UEP).
3. Diketahuinya upaya panti-panti sosial dalam mengatasi masalah pembiayaan kegiatan selanjutnya (apabila subsidi dihentikan).

Adapun manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan rasional bagi pimpinan Departemen Sosial dalam pengembangan kebijakan dan program pemberdayaan panti sosial di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi (*evaluatif research*), yang dilaksanakan dalam upaya mengetahui kekuatan dan kelemahan program subsidi panti sosial, serta suatu cara menentukan perbaikan bagi para pengambil keputusan di Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Penentuan lokasi dilakukan secara **purposive**, dengan pertimbangan variasi panti sosial yang menerima subsidi dari Departemen Sosial pada tahun 2005. Adapun jenis-jenis panti sosial yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah : Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Tresna Werdha, Panti Sosial Penyandang Cacat, Panti Sosial Pamardi Putra dan Panti Sosial Tuna Sosial. Berdasarkan pertimbangan persebaran data panti penerima program subsidi panti, maka penelitian ini dilaksanakan di 5 (lima) provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Di setiap lokasi penelitian ditentukan panti sosial sebanyak 10 unit dengan mempertimbangkan variasi panti sosial. Sumber data untuk setiap provinsi terdiri dari unsur Dinas Sosial provinsi (2 orang), pengelola panti sosial (10 orang) dan klien (10 orang), yang ditentukan secara **purposive**. Dengan demikian jumlah responden di lima provinsi adalah 360 orang (10 orang Instansi sosial, 100 orang pengelola panti dan 250 klien panti). Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, diskusi kelompok terfokus dan studi dokumentasi.

Data yang terkumpul, dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan editing, kategorisasi, tabulasi, analisis dan interpretasi. Secara kualitatif, data yang terhimpun dianalisis dengan mempertimbangkan informasi dan masukan dari tiap responden dan informan lainnya yang didapat melalui wawancara.

Gambaran Umum Panti Sosial

Panti sosial yang menjadi sampel dalam Penelitian ini adalah panti sosial milik pemerintah daerah (74%) dan milik masyarakat (26%). Khusus untuk Provinsi Sumatera Utara, panti sosial milik pemerintah daerah tidak

memperoleh subsidi panti. Adapun jenis dan jumlah panti sosial terdiri dari 32 Panti Sosial Anak Terlantar (64%), 5 Panti Sosial Lanjut Usia (10%), 7 Panti Sosial Penyandang Cacat (14%), 4 Panti Sosial Tuna Sosial (8%) dan 2 Panti Sosial Napza (4%).

Sarana perkantoran yang dimiliki panti sosial berdasarkan data sekunder di setiap panti menunjukkan sebanyak 26% panti sosial belum memiliki komputer, 10% belum memiliki telepon dan sebanyak 72% belum memiliki *faxsimilie*. Sementara peralatan *sound system* dan *tape recorder* baru 22% yang memilikinya. Peralatan kantor lainnya seperti meja kerja dan lemari arsip sudah dimiliki oleh panti-panti sosial dengan jumlah terbatas, sedangkan *filling cabinet*, *calculator* dan brankas dimiliki oleh sebagian kecil panti-panti sosial. Sarana teknis seperti modul sebagai alat/panduan pelayanan kepada klien hanya sebagian kecil (26%) panti sosial yang memilikinya dan umumnya panti sosial milik pemerintah daerah. Peralatan olah raga dan kesenian sebagian besar (88%) sudah memilikinya. Sementara peralatan terapi medik, fisioterapi dan alat pijat refleksi dimiliki oleh panti sosial cacat dan panti sosial Napza. Sebanyak 48% panti sosial memiliki kendaraan bermotor roda empat dan 96% memiliki kendaraan roda dua.

Sumber dana tetap berasal dari Dinas Sosial provinsi (54%), Yayasan Dharmais (48%), APBD (32%) dan dari donatur/masyarakat sebesar 18%. Sumber dana tidak tetap terbesar berasal dari donatur/masyarakat (72%) dan Dinas Sosial provinsi (28%).

Secara struktural panti-panti sosial pemerintah dipimpin oleh seorang kepala, dibantu oleh beberapa orang kepala seksi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah setempat (Bupati/Walikota). Sedangkan pimpinan panti sosial swasta sebagian besar diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yayasan, sebagian para pengurus/pengelola panti (kepala, sekretaris, bendahara, pengasuh dan tenaga lainnya) ada yang berasal dari anggota keluarganya sendiri.

Jumlah tenaga di 50 panti sosial sebanyak 937 orang dan 69,05% diantaranya adalah tenaga tetap, yakni Pegawai Negeri di panti-panti sosial pemerintah., sedangkan tenaga tidak tetap merupakan tenaga honor panti. Tingkat pendidikan tenaga panti terdiri dari SLTA (44,99%), sarjana muda, sarjana dan pasca sarjana (44,11%), sedangkan tenaga yang berpendidikan SD dan SLTP (9,77%) bertugas sebagai pengemudi, bagian gudang, juru masak, tukang cuci dan satpam. Tenaga teknis terdiri dari pengasuh

(37,04%), pekerja sosial (27,37%), kerohanian (13,32%) dan lainnya adalah instruktur, psikolog, perawat, dokter/psikiater, analis laboratorium dan konselor. Khusus tenaga teknis pekerjaan sosial secara kuantitas masih relatif terbatas, yaitu rata-rata 3 orang per panti sosial, yang rata-rata per pekerja sosial mendampingi 74 orang klien. Rasio ini sangat berat terutama untuk klien penyandang masalah *pathologis*, seperti penyandang cacat dan korban napza.

Pemahaman tentang pekerja sosial ini di setiap panti berbeda-beda. Sebagian besar panti-panti sosial milik pemerintah daerah berpendapat bahwa tenaga pekerja sosial merupakan tenaga profesi yang seharusnya mempunyai latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, atau yang pernah mengikuti pelatihan profesi pekerjaan sosial. Sementara sebagian panti (terutama panti sosial swasta) menyatakan bahwa pekerja sosial yang dimaksud disini adalah relawan sosial yang melaksanakan pelayanan berdasarkan *charitatif*. Perbedaan persepsi tentang pekerjaan sosial ini berpengaruh terhadap pelayanan sosial kepada klien

Bentuk dukungan paling besar (74%) terhadap panti-panti sosial dalam jaringan kerja adalah bidang kesehatan yang diwujudkan dalam bentuk pengobatan kepada klien di puskesmas dan rumah sakit serta pelatihan keperawatan untuk lanjut usia. Sedangkan pelatihan keterampilan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Dinas Perindustrian memberikan dukungan magang kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha, Kantor Urusan Agama memberikan bantuan pembimbing agama/mental kepada klien, Dinas Sosial dan BKKKS memberikan dukungan pelatihan manajemen panti. Namun, pelatihan ini baru diberikan sebanyak 46% dari panti-panti sosial. Selain itu pihak kepolisian juga memberikan penyuluhan tentang bahaya Napza. Dukungan dalam bentuk beasiswa diberikan oleh Muhammadiyah dan gereja.

Mengenai pemenuhan kebutuhan fisik klien, diperoleh informasi sebanyak 50% panti memberikan menu makan tiga sehat plus berupa nasi, sayur, lauk dan pauk, kadang-kadang buah. Sedangkan 36% memberikan makan tiga sehat berupa nasi, sayur dan lauk pauk. Hanya sebagian kecil panti sosial yang memberikan menu makan empat sehat dan empat sehat plus berupa nasi, sayur, lauk pauk, kadang-kadang buah bahkan kadang-kadang susu. Menu makanan rata-rata terdiri dari makanan pokok, sayur, lauk pauk, buah ditambah susu. Sedangkan makanan tambahan diwujudkan dalam bentuk kue, kolak, kacang hijau dan buah-buahan.

Sebagian besar (96%) panti-panti sosial memberikan pakaian sekolah, pakaian lebaran, pakaian ibadah (sarung, baju koko, mukena) dan pakaian dalam, yang biasanya dikaitkan dengan hari raya Idul Fitri dan Natal, sedangkan pakaian sekolah diberikan sesuai kebutuhan klien. Kadang-kadang pakaian juga diberikan oleh para dermawan pada saat mengadakan kunjungan ke panti.

Sebagian besar tempat tinggal klien menggunakan asrama (96%), lainnya dalam bentuk wisma (*cottage*). Apabila dilihat dari total jumlah klien, 95,83% klien tinggal dalam asrama dan 4,17% tinggal di *cottage*.

Sebagian besar (98%) Panti sosial juga memberikan peralatan/perengkapan mandi seperti sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi, odol, handuk dan pakaian dalam, yang diberikan setiap bulan dan ada yang tidak setiap bulan. Dalam bidang kesehatan, pelayanan yang diberikan meliputi P3K, rujukan ke puskesmas atau rumah sakit umum/daerah setempat.

Mengenai kegiatan pembinaan fisik, sebagian besar panti sosial melaksanakan kegiatan senam secara rutin, sedangkan bola volley, sepak bola dan tenis meja dilaksanakan secara insidental pada sore hari. Pelaksanaan bimbingan fisik sebagian besar memanfaatkan tenaga dari dalam panti, sedangkan penyuluhan kesehatan melibatkan tenaga Puskesmas setempat. Jenis bimbingan mental/psikososial yang dilaksanakan di panti-panti sosial meliputi bimbingan agama, bimbingan bicara (*speech therapy*), bimbingan kedisiplinan, konsultasi, pramuka dan psikoterapi.

Pemahaman bimbingan sosial di setiap panti berbeda-beda sesuai dengan persepsi pimpinan/pengelola panti sosial. Jenis bimbingan sosial yang selama ini diberikan oleh panti-panti sosial meliputi sosialisasi dengan lingkungan/masyarakat, pengabdian masyarakat dan gotong royong.

Bimbingan keterampilan yang ada di panti-panti sosial memiliki tujuan yang berbeda-beda. Secara umum kegiatan ini mempunyai tujuan: (1) memberikan keterampilan kepada klien, sehingga kegiatan ini merupakan program pokok bagi klien dalam panti, seperti yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Remaja; (2) sebagai terapi dalam usaha membantu penyembuhan klien sebagaimana kegiatan keterampilan yang dilaksanakan oleh Panti Sosial Bina Laras; dan (3) merupakan kegiatan ekstra kurikuler atau sekedar mengisi waktu luang. Walaupun memiliki tujuan yang berbeda, sebagian besar (86%) panti sosial melaksanakan bimbingan keterampilan

secara rutin, 2 % melaksanakan bimbingan keterampilan secara insidental dan 12 % panti sosial tidak melaksanakan bimbingan keterampilan. Jenis bimbingan keterampilan di setiap panti sosial bervariasi, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing panti. Setiap panti sosial ada yang melaksanakan 1 atau 2 jenis keterampilan ada juga yang melaksanakan 3 - 5 jenis keterampilan. Pelaksana kegiatan ini, sebagian memanfaatkan tenaga dalam panti, sebagian panti memanfaatkan tenaga dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan dunia usaha.

Pemanfaatan Subsidi Panti

1. Subsidi Makanan

Panti-panti yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah panti-panti sosial yang mendapatkan subsidi makanan pada tahun 2004 dan 2005. Namun, untuk tahun 2005 ini tidak semua panti yang menjadi responden mendapatkan subsidi makanan. Panti-panti milik pemerintah daerah untuk Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan tidak mendapatkan subsidi makanan dengan alasan sesuai dengan Surat Edaran dari Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa panti milik Pemerintah tidak mendapatkan subsidi ini. Padahal, menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang tidak mendapatkan subsidi makanan adalah panti milik Pemerintah (pusat) bukan milik Pemerintah Daerah.

Tidak semua panti sosial mendapatkan subsidi makanan sesuai dengan jumlah klien. Dari 50 panti sosial dengan jumlah klien 3.693 orang, yang mendapatkan subsidi sebanyak 2.450 orang atau 66.94% dari total klien dalam panti sosial. Untuk itu pemanfaatan subsidi diserahkan sepenuhnya kepada panti-panti yang menerimanya. Dengan demikian, ada keleluasaan bagi pengelola panti untuk mengelola subsidi sebatas untuk biaya makanan dan bukan untuk kebutuhan yang lain. Bagi panti yang telah memiliki sumber tetap seperti dari APBD (khusus panti pemerintah), dari Yayasan Dharmais, dari Yayasan pendukung utama operasional panti dan sebagainya, subsidi panti dapat digunakan sebagai tambahan sumber dana panti.

Subsidi makanan yang besarnya Rp. 2.250,- per orang sangat signifikan sebagai suplemen pemenuhan makanan klien yang digunakan

untuk menambah jumlah dan kualitas makanan yang diberikan kepada klien. Untuk Panti Pemerintah, subsidi dimaksud digunakan untuk menambah lauk-pauk, makanan tambahan dan susu. Hal ini berkaitan dengan sudah adanya dukungan APBD untuk menu pokok harian. Sedangkan untuk panti swasta, subsidi makanan terkesan menjadi “yang utama”. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya/kurangnya sumber dana tetap. Apabila dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) setempat untuk jenis barang yang dikonsumsi klien sehari-hari, secara rata-rata maka jumlah anggaran dimaksud antara kurang dan lebih dari mencukupi.

Menu makanan yang diberikan panti Pemerintah mengikuti menu yang sudah ditetapkan dengan jadwal yang pasti dan masih dapat memberikan buah dan susu serta makanan tambahan seperti kacang hijau, meski tidak setiap hari. Sedangkan panti swasta, ada yang belum/ tidak dapat memberikan makanan tambahan. Namun demikian, ada satu panti swasta yang dapat memberikan makanan tambahan.

Menu makanan yang diberikan panti kepada kliennya diusahakan sedemikian rupa untuk memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Namun demikian, untuk sebagian panti swasta standar tersebut masih dirasakan sebagai *'utopia'* karena perbandingan jatah SOSH dengan harga setempat masih relatif jauh.

Membandingkan jatah SOSH dengan HET setempat tampak adanya angka 'minus' dari anggaran panti untuk mengadakan bahan makanan tiap harinya. Untuk itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan SOSH dengan kebutuhan tiap orang

No.	Provinsi	SOSH (Rp)	Harga Kebutuhan per orang per hari (Rp)	Kekurangan (Rp)
1.	Sumut	7.500,-	10.120,-	2.620,-
2.	NTB	9.000,-	10.100,-	1.100,-
3.	DI Yogya	10.000,-	11.150,-	1.150,-
4.	Kalbar	9.600,-	11.140,-	1.540,-
5.	Sulsel	11.000,-	9.900,-	1.100,-

Panti-panti pemerintah yang mendapatkan jatah SOSH tampak terjadi defisit tiap harinya, sehingga tuntutan untuk dapat memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna hampir pasti tidak dapat terpenuhi. Kondisi ini lebih parah dirasakan oleh panti swasta, karena tidak memiliki

sumber dana tetap seperti yang dimiliki panti pemerintah. Dari pengamatan pada waktu penelitian, tampak bahwa beberapa panti hanya mampu memberikan makanan seadanya kepada kliennya. Klien tidak setiap saat mendapatkan jatah lauk pauk yang memenuhi standar gizi dan bahkan kalau mereka mendapatkan makanan harian hanya dalam wujud nasi dan sayur yang dimasak dengan cara diberikan banyak kuah.

Banyak panti swasta yang hanya dapat merasakan lauk pauk enak apabila klien panti dimaksud diundang untuk acara selamatan di masyarakat sekitar panti atau panti mendapatkan hantaran dari masyarakat dalam wujud makanan matang. Khusus untuk Yogya, tampak bahwa indeks kebutuhan lebih tinggi, meskipun secara umum diketahui bahwa HET relatif lebih murah bila dibandingkan dengan provinsi lain. Di Yogya panti milik pemda memberikan snack/ makanan ringan pada medio pagi dan sore. Harga makanan ringan dimaksud ditetapkan Rp 1.000,- tiap kali dan dengan demikian tiap hari diperlukan Rp 2.000,- untuk makanan ringan dimaksud. Jadi nilai Rp 11.150,- untuk Yogya merupakan kebutuhan paling besar dibandingkan panti-panti di provinsi lain.

2. Subsidi Usaha Ekonomi Produktif

Tidak semua panti responden mendapatkan subsidi UEP yang besarnya Rp 10 juta (subsidi baru) dan Rp 25 juta (subsidi pengembangan usaha). Untuk itu dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2. Jenis Subsidi UEP yang didapatkan

No.	Subsidi UEP	Jumlah	%
1.	Baru	31 panti	62
2.	Pengembangan	4 panti	8
3.	Tidak ada UEP	15 panti	30

Dari 31 panti yang mendapatkan subsidi UEP baru dan 4 panti yang mendapatkan subsidi pengembangan UEP dan dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, dari yang sifatnya ternak, usaha kerja hingga usaha jasa. Selain itu diketahui bahwa terdapat panti yang mengembangkan usahanya dalam 1 jenis atau lebih jenis usaha.

Mengenai variasi jenis usaha/kerja diperoleh informasi, bahwa warung sembako menempati jumlah terbanyak (18,92%). Kemudian

wartel dan rental komputer menempati urutan ke dua (10,81%). Pilihan ini tentunya berkaitan dengan kemudahan pemasaran dari hasil usaha/kerja yang dipilih. Sedangkan jenis usaha lainnya, antara lain: ternak ayam, kambing dan sapi, budidaya lele, menjahit, salon, tanaman hias, bengkel, foto copy, koperasi/ simpan pinjam, bengkel dan pertukangan. Alasan pemilihan jenis usaha ini berkaitan dengan pemasaran (31,33%), lokasi (21,69%), SDM/pengelola (13,25%) dan lain alasan.

Dalam memanfaatkan dana subsidi UEP, masing-masing panti kemudian menjalin relasi dengan pihak lain sehingga diharapkan dapat mencapai peningkatan kemampuan kerja/produksi sekaligus dalam rangka pemasaran. Adapun jalinan kerja dimaksud, antara lain dengan pihak dunia usaha serta institusi milik pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian terdapat panti yang tidak melakukan jalinan kerja sama karena usahanya ada yang memang sudah dalam keadaan tidak operasi dan sebagian merasa dapat mengatasi sendiri masalahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalinan terbanyak adalah dengan toko, terutama bagi panti yang mengembangkan UEP dalam bentuk jualan sembako. Jalinan dimaksud terutama dalam rangka pengadaan bahan dagangan. Didapatkan informasi bahwa sebagian toko memberikan kemudahan seperti mengambil barang terlebih dahulu dan baru membayar kemudian setelah barang dagangannya terjual.

Jalinan terbesar ke dua adalah dengan PT Telkom. Ini berkaitan dengan jenis usaha yang dikembangkan panti, yakni Wartel atau Warnet. Sementara itu, untuk jalinan dengan lembaga/institusi lain adalah dalam rangka peningkatan keterampilan dan pemeliharaan usaha.

Kerja sama dengan pihak lain baik dunia usaha maupun institusi dimaksudkan sebagai praktek kerja, peningkatan kemampuan hingga upaya pemasaran. Bentuk kerjasama/dukungan terhadap Panti Sosial antara lain praktek kerja, diklat perbengkelan, pemasaran dan penyuluhan kesehatan.

Pengaruh Subsidi

Untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh program subsidi panti ini, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang didukung oleh tabel distribusi frekuensi dan diagram.

1. Makanan

Beberapa aspek terkait dengan makanan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, yaitu *frekuensi makan, menu makan (yang menggambarkan kualitas makanan) dan makanan tambahan*.

Pada aspek frekuensi makan, program subsidi panti tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sebelum menerima subsidi, 96 persen panti sosial sudah memberikan makan tiga kali sehari dan kemudian menjadi 100 persen setelah menerima subsidi, atau ada penambahan sebesar 4 persen. Perubahan ini dinilai bermakna, karena dengan subsidi panti akhirnya seluruh panti kini sudah sesuai dengan *Standardisasi Panti Sosial* dalam pemberian makanan, khususnya dalam hal frekuensi makan.

Aspek kedua dari makanan adalah menu makan klien dalam panti sosial yang menggambarkan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh klien. Menurut ahli gizi, makanan dikatakan sehat apabila secara umum telah memenuhi empat sehat lima sempurna, yaitu nasi, sayur, lauk-pauk, buah-buahan dan susu. Ukuran ini sebagai dasar bagi peneliti untuk mencermati menu makan yang disediakan panti sosial.

Pada umumnya sebagian besar panti sosial sudah menyusun menu makan per hari bersama ahli gizi setempat. Namun, menu yang telah disusun tersebut belum dapat dilaksanakan setiap hari karena keterbatasan anggaran. Di lapangan, peneliti menemukan data, bahwa panti sosial belum sepenuhnya mengikuti daftar menu makanan yang telah disusun. Misalnya, untuk pemberian buah-buahan dan susu, pada umumnya panti sosial memberikan 2 - 3 kali seminggu. Berdasarkan kondisi lapangan itu, maka menu makan yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 (lima) ukuran, yaitu dua sehat, tiga sehat, tiga sehat plus, empat sehat dan empat sehat plus yang menggambarkan skala ordinal. Namun demikian, data yang dikumpulkan hanya memenuhi 2 (dua) ukuran yaitu tiga sehat dan tiga sehat plus yang akan dianalisis kemudian.

Tabel 3. Kualitas Makan Sebelum dan Sesudah Subsidi

No.	Menu Makanan	Sebelum		Sesudah	
		F	%	F	%
1.	Tiga sehat	18	36	3	6
2.	Tiga sehat plus	32	64	47	94
Jumlah		50	100	50	100

Berdasarkan tabel di atas, program subsidi panti memberikan pengaruh positif pada penyajian menu atau kualitas makanan panti sosial.

Aspek berikutnya untuk melihat pemenuhan makanan klien adalah pemberian makanan tambahan. Makanan tambahan memang tidak termasuk makanan utama. Namun, klien panti sosial memerlukan makanan tambahan sebagai tambahan gizi, baik terkait dengan tumbuh kembang (bagi anak-anak) atau kesehatan (bagi orang dewasa). Perbandingan sebelum dan sesudah subsidi dari makanan tambahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Makan Tambahan Sebelum dan Sesudah Subsidi

No.	Makanan Tambahan	Sebelum		Sesudah	
		F	%	F	%
1.	Setiap hari	4	8	6	12
2.	Kadang-kadang	28	56	42	84
	Tidak ada	18	36	2	4
Jumlah		50	100	50	100

Berdasarkan data tersebut, program subsidi panti dapat disimpulkan berpengaruh positif dan signifikan pada kemampuan panti dalam memberikan makanan tambahan. Dari ketiga aspek yang dicermati dalam penelitian ini bahwa :

- 1) Pengaruh terhadap frekuensi atau kuantitas permakanan, terjadi peningkatan dari semula 96 persen menjadi 100 persen panti sosial yang memberikan makan 3 kali sehari.
- 2) Pengaruh terhadap menu atau kualitas :
 - a) Terjadi penurunan dari semula 36 persen menjadi 6 persen panti sosial yang memberikan makan tiga sehat (pindah ke tiga plus).
 - b) Terjadi peningkatan dari semula 64 persen menjadi 94 persen panti sosial yang memberikan makan tiga sehat plus.

- 3) Pengaruh terhadap makanan tambahan :
- a) Terjadi peningkatan dari semula 64 persen menjadi 96 persen panti sosial yang memberikan makanan tambahan.
 - b) Terjadi peningkatan dari semula 8 persen menjadi 12 persen panti sosial yang memberikan makanan tambahan setiap hari.
 - c) Terjadi peningkatan dari semula 56 persen menjadi 84 persen panti sosial yang memberikan makanan tambahan kadang-kadang (2-3 kali seminggu).

Berdasarkan informasi tersebut disimpulkan, bahwa pengaruh subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan makanan pada panti-panti sosial pada kategori rendah, yaitu berkisar 30 persen. Data ini menunjukkan, bahwa pada umumnya sebelum menerima program subsidi panti, panti sosial sudah memberikan kebutuhan makanan relatif baik, dilihat dari aspek frekuensi, menu dan makanan tambahan. Panti sosial sudah berupaya memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan klien. Hal ini menggambarkan bahwa panti sosial pada umumnya sudah memiliki pemahaman akan eksistensinya sebagai organisasi pelayanan manusia (*human service organization*).

Meskipun secara kuantitatif pengaruh program subsidi panti relatif rendah, tetapi secara kualitatif memberikan manfaat yang sangat besar. Sebagaimana dikemukakan oleh para pengelola panti sosial, program subsidi panti sangat membantu kelancaran proses pelayanan dan karenanya perlu dilanjutkan.

2. Usaha Ekonomis Produktif

Berbagai jenis UEP diselenggarakan oleh panti sosial, yang hasilnya dapat diambil harian, mingguan maupun bulanan. Dalam rangka mengetahui pengaruh subsidi bidang UEP, ada 4 aspek yang dicermati dalam penelitian ini, yaitu *penambahan jenis UEP, penambahan omzet/minggu, penambahan aset dan pemanfaatan untuk kebutuhan operasional*.

Dari 32 panti sosial yang menerima program subsidi untuk kegiatan UEP, sebesar 8 panti sosial (25%) sudah berkembang (ada penambahan jenis UEP), dengan rincian 5 panti menambah satu jenis usaha dan 3 panti menambah 2 jenis usaha. Jenis-jenis usaha yang merupakan usaha tambahan dari usaha utama, yaitu rental komputer,

traso, ternak ayam dan wartel. Sebagian besar (75%) panti sosial masih mengelola usaha utama dari program subsidi, meskipun sebanyak 14 panti sosial (43.75%) menerima subsidi untuk pengembangan UEP. Hal ini berarti terdapat 6 panti sosial yang menerima subsidi pengembangan UEP digunakan untuk menambah modal usaha utamanya.

Aspek kedua dari UEP adalah penambahan omzet dari usaha yang dikelolanya. Aspek ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana UEP yang dikelola panti sosial mengalami perkembangan dari kondisi awal. Hal ini didasari anggapan dasar, bahwa apabila panti sosial sudah mengelola UEP dengan baik minimal selama 1 tahun, maka sudah terjadi peningkatan omzet. Dari 32 panti sosial yang mengelola UEP, sebanyak 23 panti sosial (71.88%) mengalami peningkatan omzet, yang berkisar Rp. 25.000/minggu hingga Rp. 2.000.000,-/minggu. Namun demikian, pada panti sosial yang mengalami penambahan omzet, sebagian besar (82,61%) memiliki omzet berkisar Rp. 25.000,- Rp. 350.000,- atau rata-rata omzet Rp. 165.000,-/minggu atau rata-rata Rp. 660.000,-/bulan.

Perhitungan omzet ini hanya berdasarkan perkiraan pengelola saja, tanpa didukung oleh bukti tertulis berdasarkan pembukuan yang baik. Hal ini merupakan kendala dalam penelitian ini, karena data obyektif dalam bentuk data kuantitatif tentang omzet ini tidak dapat diperoleh. Berdasar informasi yang dihimpun dari pengelola, mereka memang tidak pernah memperoleh bimbingan pembukuan dalam pengelolaan UEP. Oleh karena itu, lemahnya administrasi pengelolaan UEP ini tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak penerima program subsidi panti.

Aspek ketiga dari pemanfaatan subsidi untuk UEP adalah penambahan aset panti sosial. Aspek ini dilandasi pula oleh anggapan dasar, bahwa dalam waktu minimal 1 tahun panti sosial sudah mampu menambah asetnya dari hasil mengelola UEP. Dari 32 panti sosial yang menerima program subsidi panti untuk UEP, hanya 4 panti sosial yang sudah mampu menambah aset masing-masing 1 jenis, yaitu peralatan rumah tangga, peralatan pesta, rak aluminium dan alat pembuat kacang telor. Hal ini menggambarkan, bahwa UEP yang dikelola oleh panti sosial belum mengalami perkembangan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi Program Subsidi Panti

Aspek berikutnya terkait dengan UEP ini adalah penambahan untuk kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebutuhan yang mendukung secara langsung pemenuhan kebutuhan klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 6 panti sosial (6,75%) dari 32 panti sosial yang mengelola UEP sudah dapat menambah kebutuhan operasional, yaitu penambahan pada kebutuhan makanan, alat-alat penerangan, alat-alat keterampilan dan pendidikan. Sedangkan 81,25% belum ada penambahan kebutuhan operasional panti.

Dari keempat aspek yang dicermati untuk mengetahui pengaruh program subsidi panti terhadap pengelolaan UEP, diperoleh informasi sebagai berikut :

- 1) Terjadi penambahan jenis UEP pada 8 panti sosial (25%). Jenis-jenis UEP antara lain rental komputer, traso dan ternak ayam.
- 2) Terjadi penambahan omzet pada 23 panti sosial (71,88%) yang besarnya sebagian besar rata-rata Rp. 165.000,-/minggu.
- 3) Terjadi penambahan aset pada 4 panti sosial (12,5%) yang sudah mengalami penambahan aset, antara lain peralatan rumah tangga, peralatan pesta, rak aluminium dan alat pembuat kacang telor.
- 4) Terjadi penambahan kebutuhan operasional pada 6 panti sosial (6,75%), antara lain untuk mendukung makanan tambahan, alat penerangan, pengadaan alat-alat keterampilan dan pendidikan.

Berdasarkan informasi tersebut, disimpulkan bahwa program subsidi panti berpengaruh relatif rendah terhadap pengelolaan dan pengembangan UEP. Dari 32 panti sosial yang menerima program subsidi panti untuk UEP, yang menonjol pada penambahan omzet. Namun demikian, penambahan omzet tersebut belum menggambarkan keberhasilan panti dalam mengelola dan mengembangkan UEP, dikarenakan besarnya omzet tersebut per minggunya masih relatif rendah. Informasi ini menggambarkan, bahwa ada proses dalam pengelolaan UEP yang tidak tepat, antara lain penentuan jenis UEP, bahan dasar, keterampilan pengelola, pemasaran dan pembukuannya.

Hal ini menggambarkan pula lemahnya proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Instansi Sosial Provinsi terhadap proses pengelolaan UEP. Pada umumnya Dinas Sosial memang melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap UEP yang dikelola panti-panti sosial. Namun demikian, informasi yang diperoleh dari kegiatan itu tidak segera ditindaklanjuti, dan akibatnya panti sosial mengelola UEP berdasarkan kemampuannya sendiri.

Program subsidi panti yang dialokasikan untuk UEP ini didasarkan pada pemikiran, apabila UEP dikelola dengan baik, maka nantinya panti sosial tidak terlalu bergantung pada pihak lain, termasuk kepada pemerintah. Namun demikian, maksud dan tujuan dari program tersebut sulit direalisasikan, dan panti sosial masih bergantung pada bantuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan. Oleh karena itu, upaya untuk memotong mengurangi ketergantungan panti sosial kepada pemerintah masih sulit diwujudkan untuk beberapa tahun ke depan.

Upaya Panti Mengatasi Masalah Pembiayaan

Dalam kaitannya dengan upaya panti mengatasi permasalahan pembiayaan, sebesar 28 persen panti sosial belum memiliki upaya atau jalan keluar apabila program subsidi panti ini dihentikan. Sementara itu, 72 persen panti sosial sudah memiliki rencana mengatasi permasalahan pembiayaan apabila program subsidi dihentikan. Dari jumlah tersebut, 50 persen panti sosial merencanakan mengembangkan UEP. Lainnya masih bergantung pada pihak luar, dan bahkan ada yang akan mengurangi jumlah kliennya. Hal ini menunjukkan kemandirian panti sosial dalam pembiayaan program dan kegiatannya masih cukup rendah

Harapan Panti Terhadap Program Subsidi

Masih ada kekhawatiran para pengelola panti sosial apabila pada saatnya nanti program subsidi panti ini dihentikan. Mereka masih mengharapkan program subsidi panti terus dilanjutkan, terutama untuk kebutuhan makanan. Informasi ini relevan dengan informasi sebelumnya bahwa sumber dana panti sosial, sebagian besar masih berasal dari pemerintah. Menurut para pengelola, apabila tidak ada dukungan pemerintah, maka panti sosial akan menanggung beban yang amat berat dalam penyelenggaraan pelayanan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan makanan.

Selain bantuan makanan, panti sosial juga mengharapkan adanya bantuan untuk UEP. Apabila panti dapat mengelola UEP, maka akan memiliki sumber dana tetap yang berasal dari panti sendiri, sehingga akan mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah dan pihak luar lainnya. Harapan berikutnya adalah pelatihan pengelolaan UEP dan pendampingan.

Implikasi Kebijakan

Sebagai suatu obyek penelitian, program subsidi panti ini menarik karena dari tahun ke tahun besarnya anggaran yang dialokasikan terus mengalami kenaikan. Khusus untuk tahun 2005, dari 50 panti sosial yang menjadi obyek penelitian ini, rata-rata setiap panti sosial menerima dana sebesar Rp. 38.247.911 per tahun. Besarnya dana subsidi panti ini apabila dilihat dari besarnya anggaran makanan pada panti sosial, rata-rata mencapai 53,48 persen. Hal ini menggambarkan cukup besarnya dukungan pemerintah cq. Departemen Sosial terhadap panti-panti sosial, demi kelangsungan penyelenggaraan pelayanan pada panti-panti sosial.

Dana yang dialokasikan pemerintah pusat dalam program subsidi panti tersebut cukup besar. Pada pemanfaatan pemenuhan makanan dirasakan oleh pengelola cukup membantu, terutama pada pemberian makanan tambahan dan meningkatkan kualitas menu. Sedangkan untuk UEP, program subsidi ini pada umumnya, belum secara signifikan memberikan manfaat bagi panti-panti sosial. Manfaat memang telah dirasakan oleh pengelola, tetapi belum dapat diketahui secara pasti seberapa besar dampak tersebut. Pada umumnya pengelola panti sosial belum melakukan pencatatan atas penggunaan subsidi untuk UEP ini. Hasil dari UEP yang bersumber dari subsidi panti tidak dibukukan tersendiri, sehingga kesulitan ketika menghitung berapa besarnya manfaat ekonomis dari program subsidi panti.

Berbagai persoalan administratif maupun teknis disinyalir terjadi secara berulang-ulang, karena skema dari program ini rawan terjadi penyalahgunaan. Proses awal penentuan panti sosial yang layak sebagai calon penerima program, jumlah klien yang diusulkan, sampai dengan pertanggungjawaban administratif, merupakan titik-titik yang lemah terjadinya bias kepentingan. Bias kepentingan ini akan semakin parah apabila proses supervisi, monitoring dan evaluasi tidak dilakukan dengan baik, baik oleh penanggung jawab program di Instansi Sosial Provinsi maupun Departemen Sosial.

Meskipun diantara panti-panti sosial sudah menerima program subsidi lebih dari satu kali, tetapi mereka masih sangat mengharapkan program tersebut tidak dihentikan. Hal ini menggambarkan, bahwa program subsidi panti pada umumnya belum mampu mendorong kemandirian panti sosial. Berdasarkan hasil penelitian, 28 persen panti sosial belum menyusun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan pembiayaan apabila program subsidi panti ini dihentikan. Sementara itu, panti sosial yang sudah menyusun langkah-langkah pun, masih mengharapakan dana pada pihak luar. Hal ini semakin menegaskan, bahwa program subsidi panti belum mampu mendorong panti-panti sosial mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah.

Dalam upaya menjawab permasalahan ketergantungan panti sosial tersebut, maka skema program subsidi panti akan lebih tepat apabila diarahkan pada bantuan untuk pengembangan UEP. Sekurang-kurangnya ada tiga alasan dari pengembangan UEP ini, yaitu: (1) mengurangi ketergantungan panti sosial pada pemerintah; (2) memperkuat komitmen dan percaya diri pengelola panti sosial di bidang pelayanan kemanusiaan; dan (3) panti-panti sosial akan semakin kreatif untuk mengembangkan skema pelayanan yang profesional. Persoalannya adalah bagaimana kemampuan panti sosial mengelola UEP tersebut, terutama dalam memilih jenis UEP yang prospektif dan dalam waktu cepat dapat memberikan hasil. Pada kerangka inilah diperlukan peran Instansi Sosial Provinsi untuk memfasilitasi panti-panti sosial tersebut menentukan pilihan UEP yang tepat.

Meskipun penelitian ini menjangkau sample panti sosial yang sangat terbatas (50 panti sosial), tetapi informasi yang diperoleh terkait dengan bantuan kepada panti-panti sosial dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mendesain program yang tepat. Terutama mengurangi ketergantungan panti sosial terhadap pemerintah dan semakin mendorong profesionalisme panti sosial dalam penyelenggaraan pelayanan. Terkait dengan itu, maka supervisi, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dengan baik, mulai dari kegiatan seleksi panti sosial hingga terminasi. Perlu dilakukan evaluasi dari unit di luar penyelenggaraan program atau pihak independen, sehingga akan diperoleh informasi yang obyektif tentang efektivitas pelaksanaan program subsidi panti ini.

Kesimpulan dan Saran

Panti-panti sosial pada umumnya memanfaatkan subsidi panti untuk dua kegiatan besar, yaitu pemenuhan kebutuhan makanan dan usaha ekonomi produktif (UEP). Meskipun klien yang diusulkan untuk memperoleh subsidi jauh lebih kecil dari yang diusulkan, atau baru menjangkau 66,94 persen, tetapi seluruh klien yang ada di panti sosial ikut menikmati subsidi tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sulit untuk mengetahui secara tepat dampak program subsidi untuk biaya makanan. Pemanfaatan subsidi untuk makanan ini, pada umumnya untuk makanan tambahan dan meningkatkan kualitas menu. Untuk makanan tambahan, diarahkan pada frekuensi pemberian makanan tambahan. Sedangkan berkaitan dengan menu, subsidi dimanfaatkan untuk menambah menu, seperti susu dan buah meskipun pemberian susu dan buah ini pada umumnya belum setiap hari. Namun demikian, diperoleh data kualitatif, bahwa subsidi panti dirasakan besar manfaatnya bagi panti-panti sosial dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan klien.

Dana dari program subsidi panti dimanfaatkan oleh panti sosial untuk membuka UEP baru ataupun pengembangan UEP yang sudah ada. Penentuan UEP yang tepat sepenuhnya diserahkan kepada panti-panti sosial sendiri. Panti-panti sosial menentukan jenis-jenis UEP didasarkan pada aspek tenaga, pasar, sarana dan bahan baku. Namun demikian, pada prakteknya baru sebagian kecil UEP yang bisa mendukung kegiatan operasional panti sosial. Hal ini menunjukkan bahwa panti-panti sosial masih menghadapi persoalan dalam pengelolaan UEP.

Program subsidi panti untuk biaya makanan memberikan pengaruh cukup nyata dalam mendukung pemenuhan kebutuhan makanan klien dalam panti-panti sosial. Ada perubahan positif pada peningkatan kualitas menu makanan yang semula tiga kali sehari, yaitu nasi sayur dan lauk kemudian menjadi tiga sehat plus, yaitu nasi, sayur, lauk dan buah-buahan meskipun tidak setiap hari. Selain itu berpengaruh pula pada frekuensi dan jenis makanan tambahan, yakni dari satu jenis menjadi dua atau tiga dan dari seminggu sekali menjadi dua kali. Diharapkan adanya perubahan kualitas dan frekuensi serta jenis makanan tambahan ini akan semakin meningkatkan derajat kesehatan klien.

Kemudian, kondisi UEP panti setelah menerima program juga menunjukkan adanya perubahan positif, meskipun belum signifikan. Baru

sebagian kecil panti sosial yang mengalami peningkatan omzet dan aset setelah menerima program subsidi panti. Terkait dengan UEP ini adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan terhadap panti sosial dalam pengelolaan UEP. Panti sosial diberikan kebebasan untuk mengelola UEP menurut caranya sendiri dan pada prakteknya panti sosial tidak tepat ketika memiliki UEP yang prospektif.

Sebagian besar panti sosial masih mengharapkan program subsidi ini terus diterimanya. Sebagian kecil dari mereka telah memiliki gagasan menemukan jalan keluar apabila program subsidi ini nantinya tidak dilanjutkan. Hal ini menggambarkan, bahwa sebagian besar panti sosial penerima program subsidi panti masih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap pemerintah untuk kelangsungan hidupnya. Hal ini menunjukkan panti justru semakin sulit melepaskan ketergantungannya pada pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pengelola dan penanggung jawab program subsidi panti, yaitu:

- a. Seleksi terhadap panti sosial calon penerima subsidi berdasarkan kondisi riil panti sebagaimana adanya.
- b. Penanggung jawab program bertanggung jawab terhadap panti sosial yang diusulkan sebagai penerima program dan memiliki data *by name by address* atas panti-panti sosial yang diusulkan. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya panti fiktif, *mark up* jumlah klien dan kelayakan panti sosial untuk menerima program. Panti sosial yang sudah mandiri, tidak memperoleh prioritas sebagai penerima program subsidi panti.
- c. Bantuan UEP perlu menjadi prioritas dibandingkan dengan subsidi untuk makanan. Terkait dengan itu, penyaluran bantuan UEP ini perlu diawali dengan pelatihan UEP dan diikuti dengan pendampingan, sehingga panti sosial tepat dalam memilih jenis UEP dan mampu mengelolanya dengan baik. Diharapkan subsidi untuk kegiatan UEP ini nantinya akan mengurangi ketergantungan panti-panti sosial terhadap pemerintah. Pemerintah perlu menetapkan jangka waktu yang tegas, yang diikuti dengan kriteria dan indikator yang terukur, kapan panti sosial akan dikurangi subsidiya atau dihentikan sama sekali.

Evaluasi Program Subsidi Panti

- d. Mekanisme pencarian dana melalui PT POS tetap dipertahankan, tetapi perlu diupayakan agar pencairan dana tidak terlambat sampai ke pengelola panti sosial dan akan mempengaruhi efektifitas program itu sendiri.
- e. Besarnya subsidi hendaknya disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) setempat (khusus makanan), sehingga setiap daerah besarnya alokasi anggaran per orang/panti akan berbeda-beda.
- f. Program subsidi panti sangat rawan dengan penyimpangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan lebih ketat mulai pada tahap penentuan panti-panti sosial calon penerima program sampai dengan penyaluran dananya. Perlu dibangun kemitraan secara sinergis antara penanggung jawab program pada unit Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Itjen, Puslitbang Kessos dan instansi sosial di daerah untuk mengawal program subsidi panti ini agar mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial RI, 2003, *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Tambahan Biaya Makanan/Gizi*, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- , 2003, *Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Usaha Ekonomis Produktif*, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- , 2005, *Standardisasi Panti Sosial*, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- , 2000, *Pedoman Akreditasi Panti Sosial*, Puslitbang Kessos.
- Mujiyadi, B., dkk, 2003, *Studi Pengembangan Panti Sosial Pamardi Putra Sebagai Panti Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Yang Komprehensif dan Profesional*, Puslitbang UKS.
- Pincus, Allen and Anne Minahan, *Social Work Practice : Model and Methode*. Illinois : Peacock Publisher Inc , 1973.
- Selo Soemardjan, Selo, 1997, “Kemiskinan Pandangan Sosiologi”, *Jurnal Sosiologi, Indonesia*, Nomor 2/September 1997, Jakarta : Ikatan Sosiologi Indonesia.

- Shortell, S.M. and Richardson, W.C. 1978, *Health Program Evaluation*, Saint Louis: The C.V Mosby Company.
- Siahaan, MPR, 2004, *Beberapa Catatan dalam Praktek Pekerjaan Sosial*, Makalah dokumen pribadi (tidak diterbitkan).
- Siporin, Max, (1975), *Introduction to Sosial Work Practice*, New York : Mac Millan Publisher Co. Inc.
- Soetarso, (1990), *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat*, KOPMA Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial : Bandung.
- Sukoco, Dwi Heru, (1991), *Profesi Pekerjaan Sosial*, Bandung : STKS Publisher.